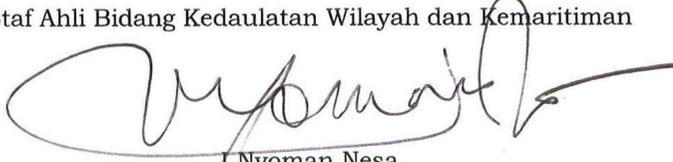
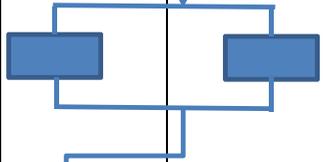


 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	OT.01.02-009-022.SA
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 14 Februari 2018
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	<p>Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman</p>  <p>Nyoman Nesa NRP. 8651/P</p>
Staf Ahli	Judul SOP Makro	Penyiapan Rekomendasi Isu-Isu di Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman
Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman		

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan tentang peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah di bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman 2. Mempunyai pengetahuan dalam merumuskan isu-isu di bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman 3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik 5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Mikro Rapat Koordinasi Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman 2 SOP Mikro Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain dari Menko 3 SOP Mikro Penyusunan Telaahan di Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Kendaraan roda dua dan empat 4. Telepon, Faksimile, dsb
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyiapan rekomendasi isu di bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman	Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Makro Penyiapan Rekomendasi Isu-Isu di Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Menko	Staf Ahli	K/L Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Staf Ahli untuk menyusun rekomendasi isu-isu di bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman				Isu-isu strategis	15 Menit	Disposisi/arahan Menko Polhukam	
2	Melaksanakan koordinasi dan komunikasi terkait penyiapan rekomendasi isu di bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk dijadikan bahan				Disposisi/arahan Menko Polhukam	360 Menit	Koordinasi dan komunikasi + bahan rekomendasi	
3	Menyusun konsep rekomendasi isu-isu di bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman untuk dilaporkan kepada Menko Polhukam				Koordinasi dan komunikasi + bahan rekomendasi	1 Hari	Hasil rekomendasi	
4	Menerima laporan rekomendasi isu-isu di bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman				Hasil rekomendasi	15 Menit	Rekomendasi isu di bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman	